



KAJIAN
PAGU INDIKATIF
KEMENTERIAN DAN LEMBAGA

2023

MITRA KERJA KOMISI X



PUSAT KAJIAN ANGGARAN
BADAN KEAHLIAN SETJEN DPR RI



**KAJIAN PAGU INDIKATIF KEMENTERIAN DAN LEMBAGA
TAHUN 2023 – MITRA KERJA KOMISI X DPR RI**

**Pengarah : Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum.
Penanggungjawab : Drs. Helmizar, M.E.
Ketua : Slamet Widodo, S.E., M.E.**

**Anggota:
Savitri Wulandari, S.E.
Ollani Vabiola Bangun, S.IP., M.M.
Iranisa, S.E., M.Acc.**

**Tim Kreatif :
Satrio Arga Effendi, S.E.
Nadya Ahda, S.E.
Leo Iskandar, S.E
Orlando Raka Bestianta, S.E.
Arjun Rizky Mahendra, S.E**

**Pusat Kajian Anggaran
Tahun 2022**



Kata Pengantar Kepala Pusat Kajian Anggaran

Alhamdulillah Robbil ‘Alamin. Puji dan syukur dipanjatkan kepada Allah SWT, karena dengan rahmat dan karunia-Nya buku **“Kajian Pagu Indikatif Kementerian dan Lembaga Tahun 2023: Mitra Kerja Komisi X”** ini dapat diterbitkan.

Pemulihan ekonomi menjadi momentum untuk melakukan reformasi struktural dalam rangka mendorong transformasi ekonomi nasional. Pandemi berimplikasi negatif terhadap agenda pembangunan dan kesejahteraan (antara lain meningkatnya angka kemiskinan dan tingkat pengangguran, tertundanya beberapa proyek infrastruktur, serta lesunya dunia usaha dan investasi). Indonesia juga masih dibayangi masalah fundamental yang perlu diatasi antara lain kapasitas produksi, daya saing, infrastruktur dan bonus demografi yang belum dimanfaatkan secara optimal. Oleh karena itu, masa pandemi juga menjadi momentum untuk melaksanakan reformasi struktural dan mendorong transformasi ekonomi. Reformasi ini difokuskan pada penguatan kualitas SDM (pendidikan, kesehatan, perlintsos), pembangunan infrastruktur, penguatan reformasi birokrasi, revitalisasi industri dan pembangunan ekonomi hijau.

Dalam bidang pendidikan, terdapat beberapa tantangan yang masih dihadapi. Beberapa tantangan tersebut antara lain indikator *Human Capital Index* (HCI) yang lebih rendah dibandingkan peers, tingkat partisipasi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Perguruan Tinggi (PT) yang belum optimal, skor PISA (*Programme for International Student Assessment*) yang belum meningkat signifikan, ketersediaan sarana dan prasarana yang belum merata, kompetensi guru yang masih perlu ditingkatkan, dan masih tingginya pengangguran lulusan vokasi. Namun hingga kini pemerintah secara konsisten melakukan berbagai terobosan kebijakan untuk meningkatkan efektivitas anggaran pendidikan dalam meningkatkan mutu pendidikan nasional. Salah satu kebijakan yang

dilakukan adalah transformasi pendidikan nasional terutama dalam upaya meningkatkan ketersediaan sarpras sekolah, penguatan PAUD, dan *link and match* pendidikan vokasi, serta kompetensi guru.

Buku ini mengkaji hal-hal yang perlu menjadi perhatian pemerintah khususnya mitra kerja komisi X dalam menjalankan programnya. Selain itu, buku ini juga menyampaikan beberapa catatan atas akuntabilitas kementerian/lembaga yang membidangi sektor kesejahteraan rakyat. Harapannya, pemerintah dapat melakukan evaluasi kinerjanya dan menjadikan hasil evaluasi tersebut sebagai dasar dalam pembahasan alokasi dan program ke depan sebagai bentuk perbaikan kebijakan.

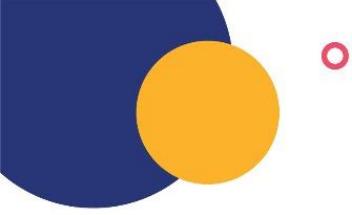
Berbagai masukan dan kritikan senantiasa kami harapkan agar lebih mempertajam substansi dan isi buku-buku yang akan kami terbitkan di masa mendatang. Dan terakhir, besar harapan kami semoga buku ini menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi pembaca.

Jakarta, Mei 2022

Kepala Pusat Kajian Anggaran
Badan Keahlian DPR RI



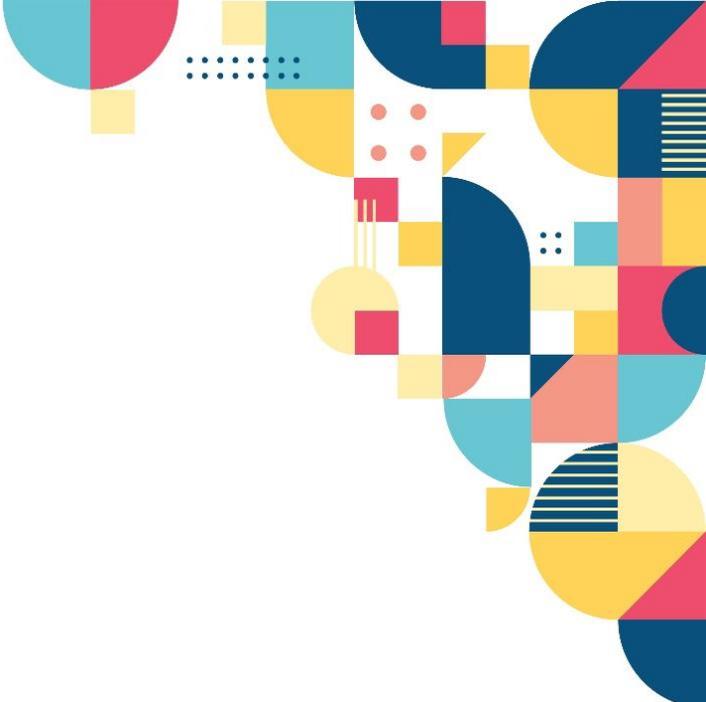
Drs. Helmizar, M.E.
196407191991031001



Daftar isi



Kata Pengantar.....	ii
Pagu Indikatif Kementerian Pendidikan Budaya Riset Dan Teknologi	2
Pagu Indikatif Kementerian Pemuda Dan Olahraga.....	2
Pagu Indikatif Perpustakaan Nasional Republik Indonesia	2
Pagu Indikatif Kementerian Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	13



KOMISI X





PAGU INDIKATIF KEMENTERIAN PENDIDIKAN BUDAYA RISET DAN TEKHNONOGI TAHUN 2023

Pagu Indikatif Kementerian Pendidikan Budaya Riset dan Teknologi (Kemedikbudristek) pada tahun 2023 dialokasikan sebesar Rp80,16 triliun yang terdiri: (i) Program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun sebesar Rp10.139,2 miliar; (ii) Program Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan Rp705,2 miliar; (iii) Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran Rp11.439,5 miliar; (iv) Program Pendidikan Tinggi Rp28.646,0 miliar; (v) Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Rp3.061,6 miliar, dan (vi) Program Dukungan Manajemen Rp19.003,4 miliar. Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung pencapaian beberapa target *output* prioritas Kemendikbudristek pada tahun 2023 antara lain: (i) Program Indonesia Pintar bagi 17,92 juta siswa, (ii) TPG Non PNS sebanyak 264 ribu orang, (iii) sertifikasi guru sebanyak 40 ribu orang, dan (iv) mahasiswa penerima bantuan KIP kuliah sebanyak 908 ribu orang.

BEBERAPA HAL YANG PERLU MENJADI ATENSI PEMBAHASAN

Berangkat dari fokus program dan *output* prioritas Kemendikbudristek pada 2023 di atas, maka terdapat beberapa hal yang perlu menjadi atensi pembahasan mengingat fokus program dimaksud merupakan tugas dan tanggung jawab Kemendikbudristek. Adapun isu utama yang perlu menjadi atensi tersebut adalah sebagai berikut:

Tingkat Partisipasi Dan Rata-Rata Lama Sekolah Masih Rendah.

Rata-rata lama sekolah pada tahun 2021 ialah hanya 8,54 tahun atau dengan kata lain, rata-rata penduduk Indonesia berusia 25 tahun ke atas menempuh pendidikan hanya sampai dengan kelas 2 Sekolah Menengah Pertama (SMP). Rata-rata lama sekolah ini akan berkaitan dengan tingkat partisipasi sekolah di mana terlihat Angka Partisipasi Murni (APM) SMA hanya sebesar 61,65 pada tahun 2021. Ini menunjukkan bahwa hanya 61,65 persen penduduk berusia 16-18 tahun bersekolah tepat waktu di jenjang SM/ sederajat. Kondisi geografis Indonesia yang beragam juga menjadi salah satu sebab APM belum maksimal. Daerah dengan tingkat kesulitan geografis yang tinggi cenderung memiliki APM yang rendah. Oleh karena itu, peningkatan kualitas sarana-prasarana penunjang kegiatan pendidikan, terutama di daerah 3T dapat menjadi perhatian dan prioritas.

Di sisi lain, ada juga daerah yang jarak ke sekolahnya relatif dekat, namun capaian APMnya juga rendah. Hal ini salah satunya dikarenakan biaya oportunitas bersekolah menjadi tinggi. Terutama di kawasan industri, masyarakat usia sekolah lebih memilih bekerja daripada menempuh pendidikan. Oleh karena itu, pemerintah dapat memberikan perhatian kepada daerah-daerah yang memiliki kecenderungan dan karakteristik seperti itu untuk memberikan bantuan biaya pendidikan kepada anak usia sekolah sehingga dapat meningkatkan partisipasi anak usia sekolah untuk bersekolah dibandingkan dengan bekerja.

Kualitas pendidikan PAUD juga harus menjadi perhatian. Hal ini dikarenakan APK PAUD Indonesia masih jauh di atas rata-rata negara ASEAN. Padahal investasi pada pendidikan usia dini memiliki peran penting dalam menciptakan SDM yang unggul. Rendahnya APK PAUD salah satunya belum meratanya akses dan fasilitas pendidikan. Fasilitas dan kemudahan akses saat ini masih banyak tersedia di daerah perkotaan daripada perdesaan.

Missmatch antara pendidikan vokasi dan dunia kerja masih dihadapi dan menjadi tantangan. Pendidikan vokasi masih menunjukkan tren peningkatan pada pengangguran terbuka yang mengindikasikan bahwa

lulusan SMK belum sepenuhnya terserap di dunia usaha. Penguatan *link and match* dengan menyelaraskan kurikulum pendidikan vokasi harus menjadi prioritas agar kurikulum tersebut relevan dan pada akhirnya lulusan vokasi dapat terserap di dunia usaha.

CATATAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ANGGARAN

Opini Laporan Keuangan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tahun 2020 adalah **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)**, artinya bahwa laporan keuangan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tahun 2020 telah menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan. Realisasi pendapatan negara dan hibah Kemendikbud (*audited*) TA 2020 ialah sebesar Rp14.077.467.723.886 atau 123,32 persen dari alokasi pendapatan yang ditetapkan, yaitu sebesar Rp11.415.134.241.700. Namun, hasil pemeriksaan BPK menunjukkan masih terdapat permasalahan-permasalahan misalnya pada penyelenggaraan Pendidikan vokasi. BPK pada IHPS Semester II tahun 2021, mengungkapkan beberapa upaya pemerintah dalam penyelenggaraan Pendidikan vokasi berbasis kerja sama industri dan dunia kerja di antaranya:

1. Membentuk forum pengarah vokasi yang beranggotakan perusahaan/organisasi dunia kerja yang memiliki rekam jejak kerja sama dengan Pendidikan vokasi;
2. Mengimplementasikan kurikulum paradigma baru pada 901 SMK Pusat Keunggulan;
3. Menyusun panduan terkait dengan menyusun peta jalan Pendidikan vokasi untuk SMK.

Namun, hasil pemeriksaan mengungkapkan temuan yang memuat permasalahan, di antaranya:

- a. Belum menetapkan peta jalan Pendidikan vokasi dan belum melakukan koordinasi dengan kementerian/Lembaga lain/pemprov/dunia kerja dalam menyusun peta jalan Pendidikan vokasi secara memadai;

- b. Belum memfasilitasi kegiatan peningkatan peran dunia kerja dalam Pendidikan vokasi secara memadai;
- c. Belum optimal dalam menjamin keselarasan kurikulum yang disusun oleh satuan Pendidikan, pelaksanaan pembelajaran praktik berbasis *teaching factory* (TeFa), mendukung penyediaan prasarana dan pelaksanaan PKL/magang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.

Selain itu, terdapat beberapa permasalahan terkait pengelolaan dan belanja pada Ditjen Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi, Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Permasalahan tersebut, antara lain:

1. Pengelolaan pendanaan dan belanja seleksi penerimaan mahasiswa baru oleh Tim Pelaksana Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi (LTMPT) belum sesuai ketentuan dalam hal:
 - a. Kedudukan kelembagaan dan kewenangan Tim Pelaksana LTMPT dalam pengelolaan keuangan negara terkait kegiatan SNMPTN.
 - b. Belum adanya pedoman yang mengatur kebutuhan biaya penyelenggaraan, sumber pendanaan, dasar tarif, dan alokasi belanja SNMPTN dan SBMPTN.
2. Pengelolaan pendanaan dan belanja Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) Non Penelitian dan Bantuan Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (BPPTNBH) belum sesuai ketentuan dalam hal pedoman perhitungan alokasi serta pertanggungjawabannya.
3. Pengelolaan bantuan pemerintah/kontrak penugasan pada Ditjen Diktristek, PTN maupun PTNBH belum sesuai ketentuan dalam hal perencanaan kebutuhan dan pertanggungjawabannya.

PAGU INDIKATIF KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA TAHUN 2023

Pagu Indikatif alokasi anggaran pada KEM PPKF 2023 yang diajukan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) lebih rendah Rp283,7 miliar atau 14,57 persen dibandingkan dengan APBN 2022. Alokasi anggaran tersebut akan digunakan untuk mencapai tujuan RPJMN 2019-2024 yaitu terwujudnya kualitas pemuda yang berideologi Pancasila, terwujudnya budaya olahraga dan prestasi olahraga di tingkat regional dan internasional, dan terwujudnya manajemen tata kelola kelembagaan pemerintahan yang baik dan bersih.

Tabel 1. Program Prioritas Kemenpora

	KEM PPKF 2021 (miliar rupiah)	APBN 2021 (miliar rupiah)	KEM PPKF 2022 (miliar rupiah)	APBN 2022 (miliar rupiah)	KEM PPKF 2023 (miliar rupiah)
Kementerian Pemuda dan Olahraga	2000,3	1948,8	1.948,8	1.948,8	1.665,1
Program Keolahragaan	1566,2	1.888,7	1.489,3	1.441,6	1.192,1
Program Kepemudaan	118,7	118,7	118,7	183,9	151,2
Program Dukungan Manajemen	315,4	315,4	340,8	323,3	321,8

Sumber: KEM PPKF

BEBERAPA HAL YANG PERLU MENJADI ATENSI PEMBAHASAN

Berangkat dari fokus program prioritas Kemenpora pada 2023 di atas, maka terdapat beberapa hal yang perlu menjadi atensi pembahasan mengingat fokus program dimaksud merupakan tugas dan tanggung jawab Kemenpora. Adapun isu utama yang perlu menjadi atensi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Capaian Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) masih rendah.

Perhitungan Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) yang dirilis pada November 2021 menunjukkan adanya penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Dengan proporsi anggaran program kepemudaan yang hanya mencapai 9 persen dari total anggaran Kemenpora dan bahkan lebih sedikit dibandingkan dengan program dukungan manajemen, sepatutnya Kemenpora dapat segera memetakan anggaran bidang kepemudaan yang tersebar di berbagai K/L lain dan juga di daerah.

2. Tidak ada Desain Besar Kepemudaan Nasional.

Penyelesaian penyusunan Desain Besar Kepemudaan sebagai landasan hukum bagi pelaksanaan program kepemudaan, terutama afirmasi bagi pemuda dan perempuan muda di daerah 3T, pemuda berpendidikan rendah, pemuda penyandang disabilitas, maupun pemuda rentan PHK akibat Pandemi Covid-19 hingga saat ini belum selesai. Maka dari itu, Kemenpora diharapkan dapat segera merampungkan Desain Besar Kepemudaan Nasional agar program/kegiatan kepemudaan dapat lebih terarah.

3. Tidak Ada DAK Bidang Pemuda dan Olahraga.

Tidak ada DAK Bidang Pemuda dan Olahraga, terutama akibat *refocussing* Covid-19. Kemenpora perlu menyampaikan upaya memperjuangkan DAK pada RAPBN untuk tahun 2023 dan seterusnya. Untuk itu, Kemenpora diharapkan untuk berkoordinasi

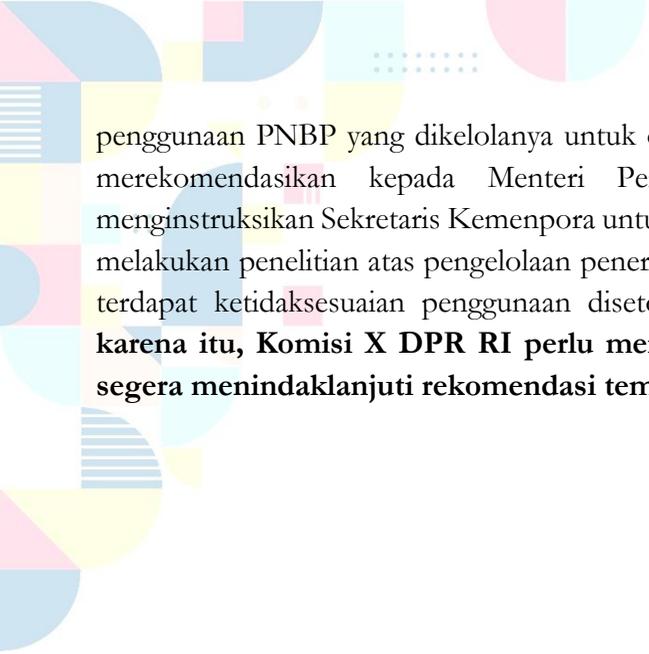
dengan Kemenkeu dan Bappenas untuk memperjuangkan DAK Bidang Kepemudaan Dan Keolahragaan pada rencana anggaran tahun berikutnya.

CATATAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ANGGARAN

Opini Laporan Keuangan Kementerian Pemuda dan Olahraga tahun 2020 adalah **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)**, artinya bahwa laporan keuangan Kementerian Pemuda dan Olahraga tahun 2020 telah menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan.

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) tahun Anggaran 2020 (*Audited*), Kemenpora mengalokasikan PNBP sebesar Rp36.974.454.00 dengan realisasi sebesar Rp41.842.547.633 atau 113,17 persen dari anggaran. Namun, masih ditemukan permasalahan atas pengelolaan PNBP, salah satunya yaitu pengelolaan PNBP pada Pusat Pemberdayaan Pemuda dan Olahraga Nasional (PP-PON) dan Sekretariat Kemenpora. Hasil pemeriksaan menunjukkan pengelolaan pendapatan atas penggunaan sarana dan prasarana pada PP-PON tidak tertib dimana ditemukan penyeteroran pendapatan atas penggunaan sarana dan prasarana tidak disetorkan ke Kas Negara sebesar Rp143.950.000 dan terdapat pengenaan tambahan biaya diluar tarif kepada pengguna sebesar Rp62.150.000 dan digunakan langsung sebesar Rp46.506.600, sedangkan sisanya sebesar Rp15.643.400 masih ada pada petugas penerima PNBP PP-PON.

Permasalahan tersebut mengakibatkan penerimaan negara tidak optimal dan tidak dapat segera digunakan dalam pelaksanaan APBN serta pengenaan di luar tarif sebesar Rp62.150.000 tidak memiliki dasar pengenaan. Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Menpora agar menginstruksikan Deputi Pemberdayaan Pemuda untuk memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada Kepala PP-PON dan Petugas Penerima PNBP PP-PON atas penarikan dan penggunaan dana di luar mekanisme APBN dan memerintahkan kepala PP-PON mengusulkan



penggunaan PNBPN yang dikelolanya untuk optimalisasi PNBPN. BPK juga merekomendasikan kepada Menteri Pemuda dan Olahraga agar menginstruksikan Sekretaris Kemenpora untuk memerintahkan Inspektorat melakukan penelitian atas pengelolaan penerimaan di luar tarif dan apabila terdapat ketidaksesuaian penggunaan disetorkan ke Kas Negara. **Oleh karena itu, Komisi X DPR RI perlu mendorong Kemenpora untuk segera menindaklanjuti rekomendasi temuan BPK tersebut.**



PAGU INDIKATIF PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023

Pagu Indikatif Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (PNRI) pada tahun 2023 dialokasikan sebesar Rp675,9 miliar yang terdiri: (i) Program Perpustakaan dan Literasi Rp429,9 miliar dan (ii) Program Dukungan Manajemen Rp246 miliar. Perkembangan pagu indikatif PNRI dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. Program Prioritas Perpustnas

(dalam miliar rupiah)

	KEM PPKF 2021	APBN 2021	KEM PPKF 2022	APBN 2022	KEM PPKF 2023
Perpustakaan Nasional RI	650,1	675,5	667,5	667,5	675,9
Program Perpustakaan dan Literasi	420,4	445,8	430,9	430,9	429,9
Program Dukungan Manajemen	229,7	229,7	236,6	236,6	246,0

Sumber: KEM PPKF

BEBERAPA HAL YANG PERLU MENJADI ATENSI PEMBAHASAN

Terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian atas pelaksanaan program PNRI antara lain:

1. Ketersediaan kualitas dan kuantitas perpustakaan masih terbatas.

Data per Februari 2022 yang dirilis oleh Perpustakaan Nasional (Perpusnas) menunjukkan bahwa tingkat perpustakaan yang telah menerapkan Standar Nasional Perpustakaan (terakreditasi) baru mencapai 6,92% atau 11.486 perpustakaan dari total 164.610 perpustakaan di Indonesia.

2. Ketersediaan jumlah buku dengan jumlah penduduk terpaut jauh dengan rasio ideal.

Jumlah buku bacaan seluruh perpustakaan di Indonesia ialah 28.512.996 eksemplar, dengan jumlah penduduk sebanyak 273,8 juta jiwa maka didapatkan rasio 1:90 atau 1 buku untuk setiap 90 penduduk. Rasio tersebut masih sangat jauh dari rasio ideal yang ditetapkan UNESCO yakni 1:3. Berdasarkan standar UNESCO tersebut maka Indonesia kekurangan buku sebanyak 792.887.004 eksemplar.

3. Tenaga pengelola perpustakaan dan pegiat literasi masih kurang.

Saat ini jumlah tenaga pengelola perpustakaan hanya 14.316 orang, jika setiap 1 perpustakaan minimal membutuhkan 1 tenaga pengelola, dengan jumlah perpustakaan sebanyak 164.610, maka secara de facto Indonesia mengalami kekurangan tenaga pengelola sebanyak 150.294 orang. Bila ditinjau berdasarkan jenis perpustakaannya, diketahui bahwa kekurangan tenaga perpustakaan terbanyak dialami oleh Perpustakaan Sekolah (6.743 tenaga perpustakaan untuk 113.541 unit perpustakaan sekolah).

Selain itu perlu juga menjadi catatan bahwa pegiat literasi (bunda

baca/bunda literasi) belum tersebar secara merata di seluruh daerah dan belum terkoordinir dengan baik sehingga aktivitas antar pegiat cenderung bersifat parsial.

4. Belum maksimalnya alokasi anggaran APBN dan APBD Prov dan Kab/Kota.

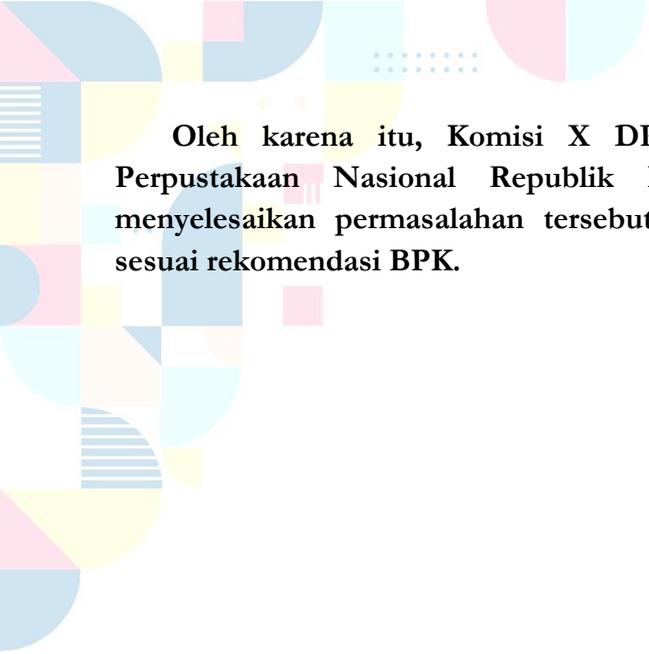
Provinsi Gorontalo merupakan daerah dengan alokasi APBD perpustakaan terendah yaitu sebesar Rp1.662.059.000, di sisi lain Provinsi Jawa Timur menjadi daerah dengan alokasi APBD perpustakaan tertinggi yaitu Rp145.448.096.959. Apabila dirata-rata, maka total dana APBD provinsi untuk perpustakaan dibagi dengan jumlah penduduk hanyalah sebesar Rp2.285.

CATATAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ANGGARAN

Opini Laporan Keuangan Perpustakaan Nasional tahun 2020 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), artinya bahwa laporan keuangan Perpustakaan Nasional tahun 2020 telah menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan.

Aset tetap pada Neraca Perpustnas per 31 Desember 2020 ialah sebesar Rp2.962.185.475.036 yang mengalami penurunan sebesar Rp88.809.986.701 dari nilai aset tetap per 31 Desember 2019 sebesar Rp3.050.995.461.737. Berdasarkan hasil pengujian secara uji petik yang dilakukan BPK atas dokumen administrasi aset tetap, serta pencatatan pada aplikasi SIMAK BMN menunjukkan permasalahan sebagai berikut:

- a. Terdapat aset tetap berupa bantuan yang sudah diserahkan ke penerima, namun masih diakui sebagai aset tetap pada neraca Perpustnas, yaitu bantuan buku siap layak kepada 45 Perpustakaan Lembaga Permasalahakatan dan bantuan sarana komputer kepada Perpustakaan Universitas Pertahanan. Aset tersebut masih tercatat pada Neraca Perpustnas per 31 Desember 2020.
- b. Terdapat aset tetap yang belum dilakukan penyusutan yang menyebabkan aset tetap belum disajikan secara akurat.



Oleh karena itu, Komisi X DPR RI perlu mendorong Perpustakaan Nasional Republik Indonesia untuk segera menyelesaikan permasalahan tersebut dengan menindaklanjuti sesuai rekomendasi BPK.



PAGU INDIKATIF KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF TAHUN 2023

Pagu Indikatif Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif TA 2023 adalah sebesar Rp3,32 triliun. Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung pencapaian target prioritas pembangunan nasional di bidang pariwisata, melalui pelaksanaan beberapa program antara lain: (i) Program Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif, dan (ii) Program Dukungan Manajemen. Adapun beberapa target output prioritas Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pada tahun 2023 antara lain: (i) promosi, event, dan konferensi sebanyak 263 kegiatan, (ii) fasilitasi dan pembinaan industri parekraf sebanyak 500 industri, dan (iii) fasilitasi dan pembinaan pelaku usaha, start-up dan UMKM parekraf sebanyak 5.890 UMKM.

BEBERAPA HAL YANG PERLU MENJADI ATENSI PEMBAHASAN

Berangkat dari fokus program dan *output* prioritas Kemenparekraf pada 2023, maka terdapat beberapa hal yang perlu menjadi atensi pembahasan mengingat fokus program dimaksud merupakan tugas dan tanggungjawab Kemenparekraf/Barekraf. Isu utama yang perlu menjadi atensi tersebut adalah sebagai berikut:

Pelaku/SDM Parekraf Belum Memenuhi Jumlah Dan Kompetensi Nasional

∴ Berkembangnya sektor pariwisata di Indonesia saat ini tidak diimbangi dengan perkembangan kuantitas dan kualitas SDM pariwisata.

Tabel 3. Target Output Kemenparekraf/Barekraf Pada Tahun 2022 dan 2023

Target Output	2022	2023
Promosi, event, dan konferensi	263 kegiatan	263 kegiatan
Fasilitasi dan pembinaan industri parekraf	6.396 industri	500 industri
Fasilitasi dan pembinaan pelaku usaha, start-up dan UMKM parekraf	5.264 UMKM	5.890 UMKM
Pelatihan dan sertifikasi SDM pariwisata	80.185 orang	
Prasarana bidang pendidikan tinggi (gedung kuliah/hotel praktik)	14 unit	

Sumber: KEM PPKF, 2023

Pada tabel 3, dapat dilihat bahwa pada tahun 2023 tidak terdapat target output pada pelatihan dan sertifikasi SDM pariwisata. Hal ini dapat mengindikasikan bahwa upaya pengembangan yang dilakukan masih terbatas. Sementara itu, dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja atas Pengembangan dan Pemasaran 10 Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP) tahun 2020 s.d Semester I 2021 ditemukan bahwa terdapat perbedaan indikator dan target terkait dengan jumlah tenaga pariwisata berdasarkan dokumen RPJMN 2020-2023 dengan Renstra Kemenparekraf/Barekraf tahun 2020-2024. Hal ini disebabkan karena Kemenparekraf/Barekraf belum memiliki data SDM pariwisata di seluruh Indonesia. Terdapat target peningkatan SDM yang belum terealisasi dimana target direktorat sebesar 29.756 orang yang terealisasi hanya sebesar 15.329 orang. Dengan demikian, diperlukan kajian pengembangan SDM pariwisata yang dapat mendorong

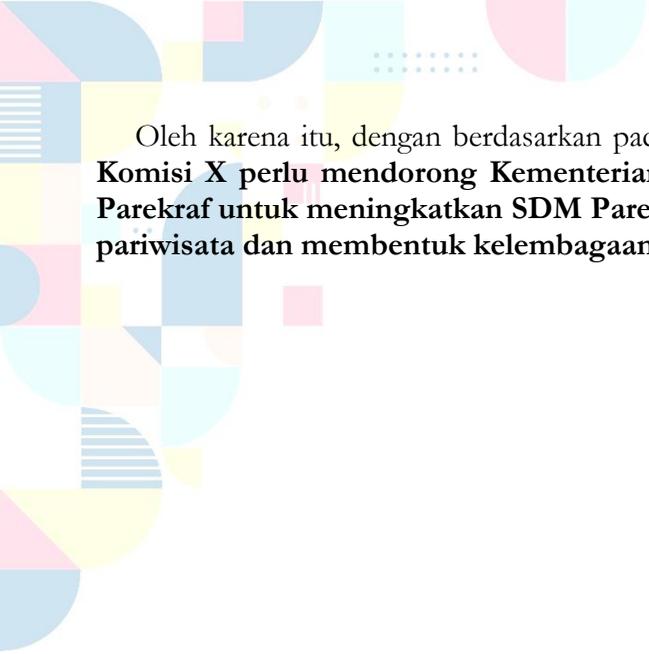
baik secara kuantitas maupun kualitas untuk dapat mengimbangi perkembangan sektor pariwisata sehingga tetap memiliki keunggulan banding (*comparative advantage*) dan keunggulan saing (*competitive advantage*) sehingga tetap mampu meningkatkan jumlah wisatawan yang berkualitas, meningkatkan devisa negara, menciptakan lapangan pekerjaan baru dan menciptakan *value chain* yang baru.

Daya saing destinasi dan industri pariwisata nasional

Peningkatan daya saing destinasi dan industri pariwisata nasional dicapai melalui indikator kinerja utama melalui peringkat Travel dan *Tourism Competitiveness Index* (TTCI). Berdasarkan Laporan Kinerja Kemenparekraf 2020, peringkat pariwisata Indonesia menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2013 berada diperingkat 70, tahun 2015 pada peringkat 50, dan melesat menjadi peringkat ke-42 pada tahun 2017, serta di tahun 2019 berada diperingkat 40. Sementara, pada tahun 2021 ditargetkan pada peringkat 36-39. Sesuai dengan hasil *Travel and Tourism Development Index* 2021 yang dikeluarkan oleh *World Economic Forum*, peringkat Indonesia meningkat menjadi rangking 32 yang sebelumnya berada pada peringkat 44. Peningkatan ini menunjukkan bahwa di tengah Pandemi Covid-19 yang terjadi terdapat perbaikan pada sektor pariwisata yang berhasil dicapai Indonesia saat ini. Sehingga menjadi penting untuk tetap menjadi perhatian oleh pemerintah.

Kelembagaan pengembangan 10 DPP

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja atas Pengembangan dan Pemasaran 10 Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP) tahun 2020 s.d Semester I 2021, kelembagaan terkait dengan pengembangan 10 DPP belum seluruhnya terbentuk dan menjalankan fungsinya secara memadai, di antaranya: (1) Badan Otorita atau KEK Pariwisata belum semua terbentuk dan beroperasi di daerah pariwisata prioritas; (2) Kemenparekraf/Baparekraf belum memiliki database dan pengembangan sistem informasi pariwisata dan ekonomi kreatif untuk 10 DPP yang memadai;



Oleh karena itu, dengan berdasarkan pada hasil pemeriksaan tersebut, **Komisi X perlu mendorong Kementerian Parekraf melalui Menteri Parekraf untuk meningkatkan SDM Parekraf, perbaikan pada sektor pariwisata dan membentuk kelembagaan di 10 DPP.**



**PUSAT KAJIAN ANGGARAN
BADAN KEAHLIAN DPR-RI 2022**

Jl. Jenderal Gatot Subroto - Jakarta Pusat
Telp. (021) 5715820 - Fax. (021) 5715267
www.puskajianggaran.com
[@puskajianggaran](https://www.instagram.com/puskajianggaran)